

OPTIMALISASI YURIDIS PELAKSANAAN UU No. 13 Th. 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES ACARA PIDANA

CAHYONO, JOKO

Pembimbing : Bambang Suheryadi, S.H., M.H.

CRIMINAL LAW

KKB KK-2 THD 10/11 Cah o

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif analitis. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan saksi, proses peradilan pidana.

ABSTRACT

The research was done due to the objective reason of a special case of the importance of a witness protection program. Meanwhile, the establishment of witness and victim protection program hasn't solved the problems in the witness protection itself. The problem statements of the research are: How is the formulation of witness protection regulations in penal law process? How is the implementation of the policy of legal protection regulations in penal law process? And, how is the policy of the legal formulation of witness protection in the penal law process. Based on the observation, a research was conducted using a descriptive, analytical method. The establishment of Witness and the Victim Protection Regulation is considered to be very important to protect their individual rights. The formulation of witness protection regulation is a phenomenon in the Indonesian criminal law procedure as the subsystem of penal law. The enforcement of this subsystem will always face the law enforcement officers. In the enforcement of witness protection law, it is found that the witnesses often are not under the protection. Even, they could turn to be the victims. That's why the formulation of the policy of witness protection program requires the harmony between the Penal Code and the Criminal Law Procedure. The witness and victim Protection laws are the magnum opus in the development of Indonesian Penal law. This law inspires the Indonesian Human Rights, especially, the witness and the victim rights in the penal law process. Thus, the witness protection program would become the standard procedures in the formulation of the Indonesian criminal law.

Key words: Witness protection, penal law procedure